



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**KECAMATAN PLANDAAN
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

**KECAMATAN PLANDAAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Plandaan sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Plandaan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Plandaan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

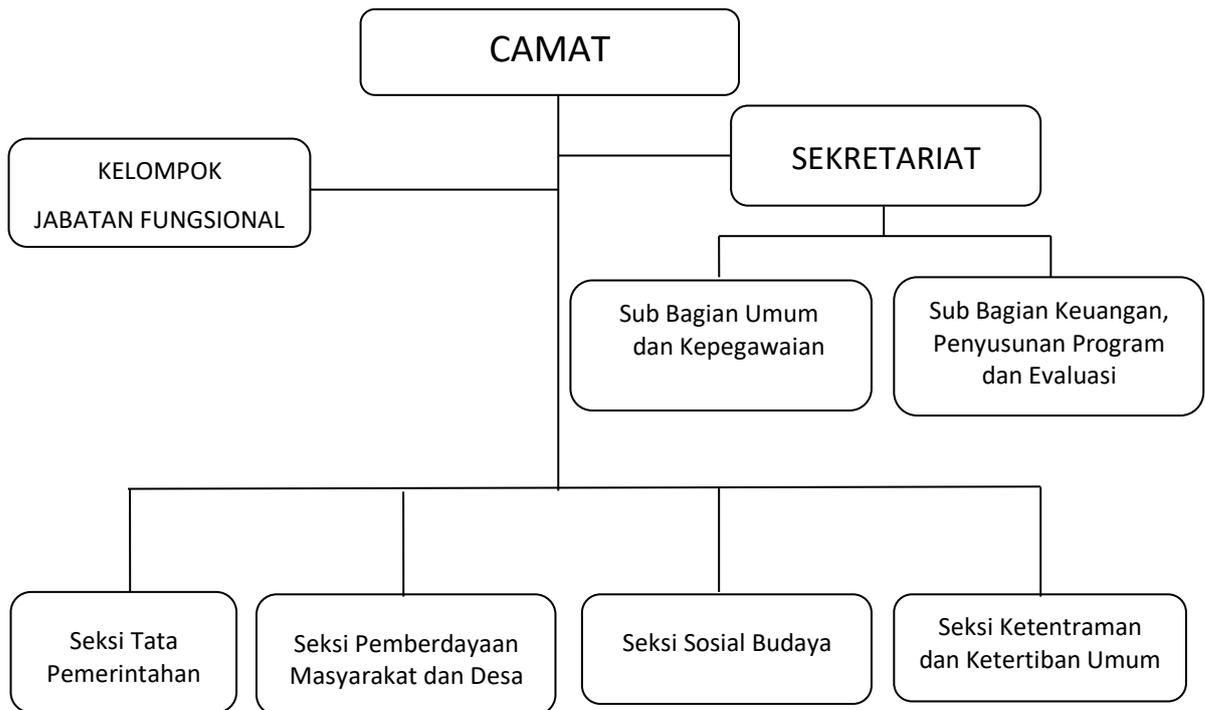
1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Susunan Organisasi Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Plandaan



Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Plandaan, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kecamatan Plandaan

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Suparno, SH	19670510 199302 1003	Camat
2	Khoirul Huda, S.Sos	19720105 199302 1003	Sekcam
3	Lina Agustien, SE	19790823 200112 2002	Kasi Tapem
4	Yayuk Dwi Hartatik, Amd.Keb.	19740215 199301 2001	Kasi Sosbud
5	Daniel Danang Darmawan, SE	19790828 200901 1012	Kasi PMD
6	Rany Yulita, SE	19830724 201505 2001	Kasubbag Sungram
7	Yunita Setyo Utami	19830307 201505 2001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Staf Kecamatan Plandaan

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Muslan, S.Sos	19760304 200801 1006	Staf
2.	Sutrisno	19670415 200604 1008	Staf
3.	Basuki, SE	19710311 200701 1026	Staf (saat ini menjabat Kepala Desa definitif)

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
7. Pengelolaan kearsipan;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
9. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa

- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
3. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
5. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai

- program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan diwilayah kerja Kecamatan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
3. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
5. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
6. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama diwilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan dengan Bupati;
9. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-

permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD

Tingkat Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Plandaan dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Plandaan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Plandaan.

2. Isu-isu strategis pembangunan Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Plandaan dapat dikategorikan dalam uraian uraian dibawah ini:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik masih sangat minim untuk mendukung pelayanan menuju Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang di Kecamatan Plandaan adalah ruang pelayanan yang sempit dan kurang representatif.

2. Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu

Desa masih terlambat dalam penyusunan RKPDes, seharusnya RKPDes disusun paling lambat tanggal 30 September, masih banyak Desa yang belum mengumpulkan RKPDes. Karena kurangnya koordinasi antara pihak DPMD, Kecamatan serta desa sangat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan RKPDes.

3. Pembinaan Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya.

4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tidak tepat waktu

Desa dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban APBDes masih terlambat seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes disusun dan dilaporkan ke kecamatan paling lambat 3 minggu setelah berakhir tahun anggaran.

5. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Plandaan karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai.

Dari deskripsi permasalahan-permasalahan berdasarkan urusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis kecamatan adalah **“Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan”**.

3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, adalah:
 - a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Plandaan sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Plandaan.
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
 - c. Belum terakomodirnya seluruh usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Plandaan yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.
 - d. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Plandaan sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Plandaan terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering

tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Plandaan pada tahun 2024 adalah merupakan upaya dalam mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

1.4 CASCADING

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran RPD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 tujuan yang akan diwujudkan adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik dengan indikator Indeks Good Governance.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 sasaran yang akan diwujudkan adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Renstra dan Renja PD.

Tujuan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang adalah :

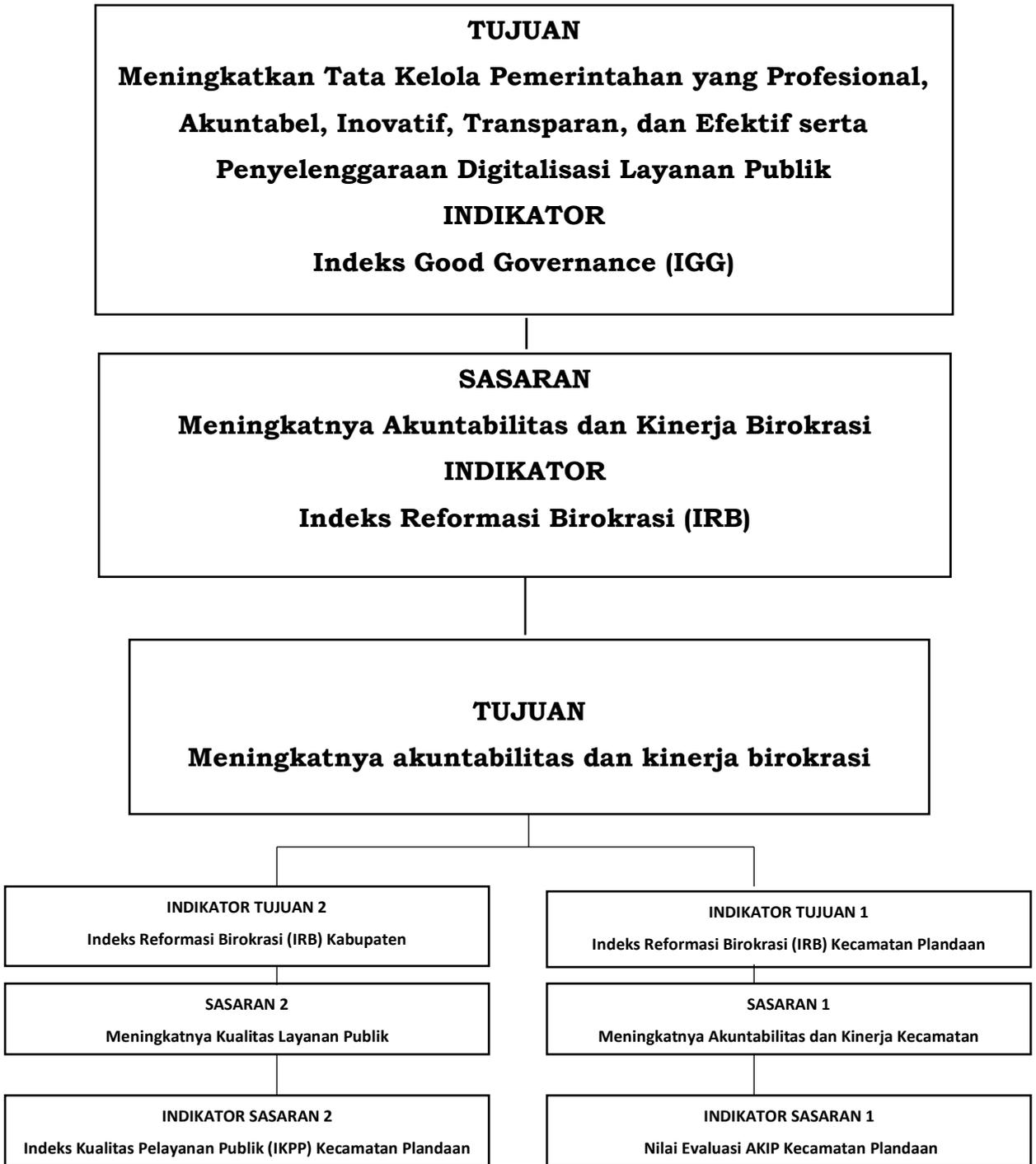
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator :

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Plandaan
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan

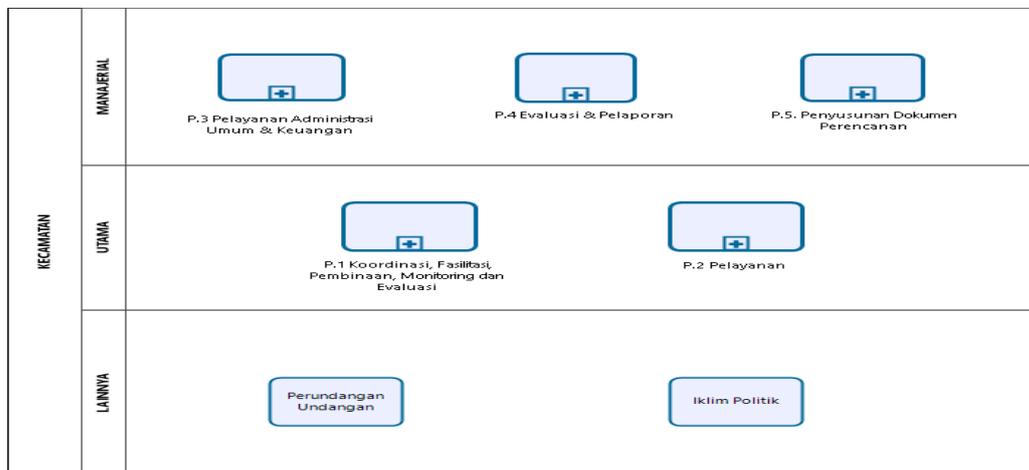
Adapun keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Renstra Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sebagai berikut :



1.5 PETA PROSES BISNIS

Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana berikut:

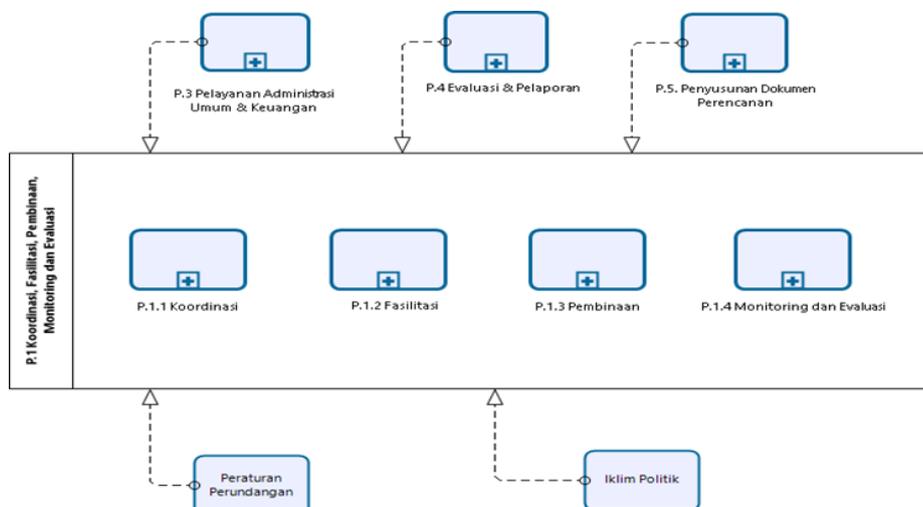
Gambar 1.2 Proses Utama Kecamatan



Powered by
bizagi
Modeler

Proses utama Kecamatan Plandaan terdiri dari

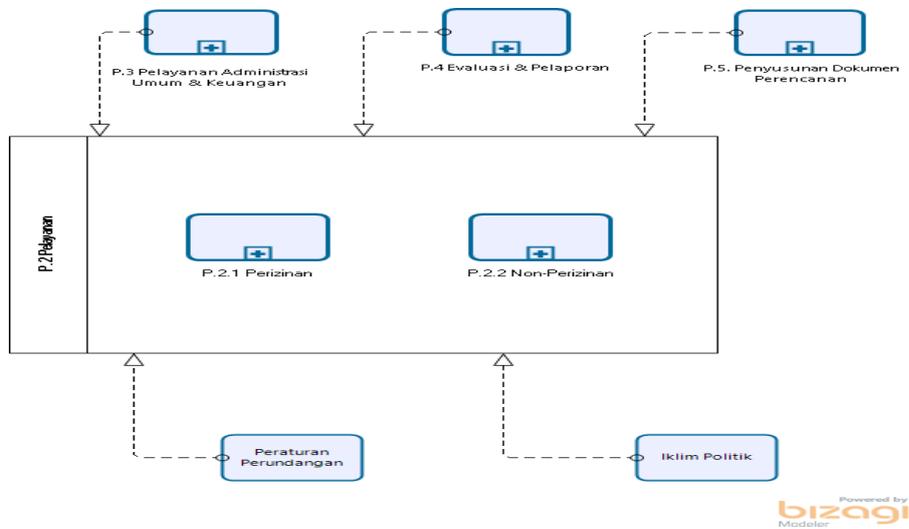
- a. P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
Kecamatan mempunyai proses utama dengan PD terkait, Koramil, Polsek dan UPTD terkait fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan desa/kelurahan.



Powered by
bizagi
Modeler

b. P.2 Pelayanan

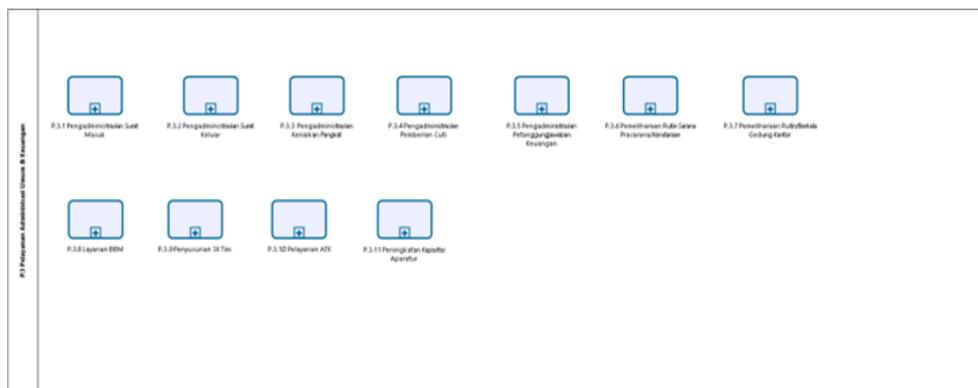
Selain itu Kecamatan juga mempunyai proses utama terkait Pelayanan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP-El, Kartu Keluarga, pindah penduduk, dan rekomendasi perizinan dan non perizinan.



Untuk mendukung proses utama, maka diperlukan juga proses manajerial yang terdiri dari:

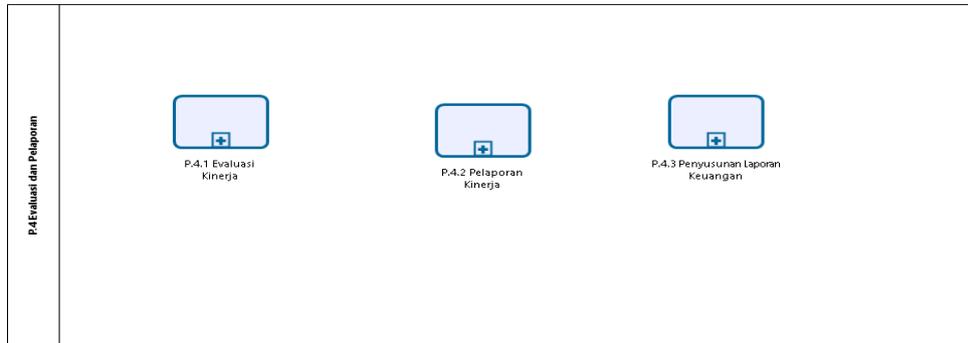
a. Pelayanan Adm. Umum dan Keuangan (kode P.3)

Kecamatan mempunyai hubungan proses manajerial dengan BKP SDM terkait pelayanan umum dan kepegawaian seperti analisa jabatan dan mutasi pegawai. Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan BPKAD dan Bank terkait anggaran dan keuangan.



b. Evaluasi dan Pelaporan (kode P.4)

Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda, BPKAD dan Sekretariat Daerah terkait evaluasi dan pelaporan.



Powered by
bizagi
Modeler

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan (kode P.5)

Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda terkait dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja dan RKA



Powered by
bizagi
Modeler

Dalam menjalankan proses utama dan proses manajerial untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan, diidentifikasi juga proses lain yang berasal dari luar organisasi yang berpengaruh signifikan, yaitu:

1. Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah;
2. Iklim politik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

A. NILAI SAKIP

➤ Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 2024

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: X.700/524/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Plandaan Tahun 2024 adalah 78,44 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik”. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan PD pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3

Hasil Nilai SAKIP Kecamatan Plandaan Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30 %	26,60	16,83	24,65	82,17
2	Pengukuran Kinerja	30 %	27,50	10,00	24,00	80,00
3	Pelaporan Kinerja	15 %	8,18	11,09	8,76	58,40
4	Evaluasi Kinerja	25 %	21,03	-	21,03	84,12
	Total	100 %			78,44	

➤ Rekomendasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kecamatan Plandaan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Plandaan Kabupaten Jombang, agar :

a. Perencanaan Kinerja

1. Melakukan tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah.
2. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang

dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.

b. Pengukuran Kinerja

1. Memberikan umpan balik atas capaian kinerja individu pada dokumen pengukuran kinerja pegawai sehingga hasil umpan balik tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian anggaran, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
2. Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya.

c. Pelaporan Kinerja

1. Upaya strategi perbaikan yang dijabarkan agar seluruhnya menginformasikan penyempurnaan kinerja kedepan serta aktivitas dalam strategi perbaikan kinerja kedepan agar seluruhnya menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.
2. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya

B. NILAI REFORMASI BIROKRASI

➤ Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 2024

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 000.8.6/10013/415.10/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Plandaan Tahun 2024 adalah 75,55 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Hasil Nilai Reformasi Birokrasi Kec Plandaan Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	6,11
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1,50
	Rencana Aksi	4%	2,17
	Monitoring dan Evaluasi	4%	2,44
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	69,44
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	38,21
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	31,23
Indeks Reformasi Birokrasi		100%	75,55

Hasil penilaian indikator kegiatan utama pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0 - 5	2	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3	Indeks Penerapan SPBE	0 - 100	84,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	0 - 100	94,12	BAPPEDA
5	Nilai SAKIP	0 - 100	78,44	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6	Tingkat Digitalisasi Layanan	0 - 100	100	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pembangunan ZI	0 - 5	3	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8	Maturitas SPIP	0 - 5	3	Inspektorat
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	1 - 5	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0 - 4	3,26	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11	Indeks Pengawasan Kearsipan	0 - 100	74,66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 - 100	70,00	Bagian PBJ Sekretariat daerah
13	Indeks Pengelolaan Keuangan	0 - 100	100,00	BPKAD
14	Indeks Pengelolaan Aset	0 - 100	84,49	BPKAD
15	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0 - 100	100	Inspektorat
16	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0 - 100	100,00	BKPSDM
17	Indeks Profesionalitas ASN	0 - 100	81,15	BKPSDM
18	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	0 - 4	2	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
19	Indeks Pelayanan Publik	0 - 5	3,65	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 - 100	98,30	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

➤ Rekomendasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Plandaan

Atas dasar beberapa catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Kecamatan Plandaan, direkomendasikan kepada Camat Plandaan Kabupaten Jombang, agar :

1. Segera menyesuaikan pengelolaan system kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan dikelola dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja BKN.
2. Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum diuraikan pada poin 9 huruf b Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
3. Terus melanjutkan proses pembangunan zona integritas dan melakukan penguatan dan perbaikan program sehingga meningkatkan efektifitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi serta optimalisasi pelayanan dan kinerja melalui penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Apabila memungkinkan dapat mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai tentang implementasi SPIP mulai dari menciptakan lingkungan pengendalian, Manajemen Risiko hingga pemantauan pengendalian intern.
5. Disarankan untuk melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, Monitoring secara berkala kepada Perangkat Daerah terkait dalam menindak lanjuti aduan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, Perlu dilakukan perbaikan pelayanan.
6. Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, serta menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel.

7. Agar menyelesaikan paket E katalog sampai ke Penilaian Penyedia dan melaksanakan pencatatan non tender.
8. Untuk Indikator Persentase Ketepatan Perencanaan dengan realisasi Pengadaan BMD, maka Perangkat Daerah di dalam menyusun RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan harus selaras dengan riil Aset/BMD yang akan dibeli atau dipelihara oleh perangkat daerah.
9. Untuk Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan BMD, maka yang harus diperhatikan adalah batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.
10. Untuk Indikator Persentase Capaian Entry Data Pengadaan BMD Dalam Sistem Informasi BMD Per 31 Desember, maka yang harus diperhatikan adalah updating data penatausahaan BMD baik pengadaan, mutasi, penghapusan, pemanfaatan dalam sistem aplikasi BMD, dimana ada tenggat waktu yang diberikan oleh MCP KPK adalah satu hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
11. Agar capaian kinerja organisasi ditingkatkan supaya bisa mendapatkan predikat Istimewa dan nilai kinerja juga bisa maksimal.
12. Melanjutkan upaya internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat diterima seluruh pegawai sampai dengan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas.
13. Ditindaklanjuti sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP.
14. Untuk dilakukan upaya perbaikan 3 unsur terendah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatannya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1.1 RENCANA STRATEGIS

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan

ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Plandaan pada periode Tahun 2024-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta

anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Plandaan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

Indikator : 1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Plandaan
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten

dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan

Indikator :

➤ Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Indikator :

➤ Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 RENCANA KERJA TAHUN 2024

Dengan berpedoman pada rencana strategis, Kecamatan Plandaan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Rencana kinerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2024 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2024.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Plandaan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Plandaan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Plandaan Tahun 2024-2026, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKPT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Plandaan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Plandaan
Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan	74,50
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.474.771.465
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Plandaan	89,50	4.903.200

3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	77.179.600
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	11.056.400
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	5.478.200
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	33.258.000
Jumlah					2.606.646.865

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana tiga tahun yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Plandaan dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan	<p>Nilai Evaluasi AKIP Kec. Plandaan</p> <p>Definisi Operasional: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Penilaian dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan hasil penilaian tim AKIP Kab. Jombang</p>	<p>Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan tahun n</p>	<p>Hasil Evaluasi AKIP Kec. Plandaan</p>
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	<p>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan</p>	<p>$IKPP = \frac{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$</p>	<p>Hasil Evaluasi IKPP Kec. Plandaan (Hasil Survey IKM Kec. Plandaan melalui https://sukmasantri.jombangkab.go.id dan Hasil Evaluasi IPP Kec. Plandaan)</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah suatu nilai komposit yang memberikan persepsi yang sama atas capaian kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) digunakan sebagai alat yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jombang mengakui pentingnya memiliki pemahaman yang holistik terhadap persepsi masyarakat dan komitmen penyelenggara pelayanan. Dua indikator utama yang mencerminkan perspektif yang berbeda ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP).</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara</p>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Plandaan diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Plandaan melalui situs https://sukmasantri.jombangkab.go.id/</p> <p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017). Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) diperoleh dari hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Jombang setiap setahun sekali.</p>		

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Plandaan, yaitu:

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10 orang/bulan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 paket
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 paket
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	46 unit
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	89,50
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan
			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	13 desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Plandaan sebagai Perangkat Daerah pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 100% - 110%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 80% - 100%	Baik (Berhasil)
3	> 60% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 20% - 60%	Kurang
5	0% - 20%	Sangat Kurang

Untuk pencapaian melebihi 110% (seratus sepuluh perseratus), dilakukan pengambilan nilai batas maksimal sebesar 110% (seratus sepuluh perseratus). Sedangkan capaian yang negatif maka dianggap sama dengan 0% (nol perseratus).

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Plandaan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra tahun 2024-2026 serta Renja Perubahan tahun 2024.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Plandaan diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2024, Kecamatan Plandaan memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Plandaan tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plandaan Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan Kecamatan :

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	78,44	105,29%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	8,56	105,55%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	89,50	95,28	106,46%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100%

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	78,44	105,29%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	8,56	105,55%
RATA-RATA CAPAIAN IKU					105,42%

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Plandaan Tahun 2024 adalah Rata-rata capaian IKU – Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (10%).

$$\begin{aligned} \text{PKO} &= 105,42 - 10,54 \\ &= 95\% \text{ Baik (Berhasil)} \end{aligned}$$

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Plandaan Tahun 2024 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan target tahun 2024 adalah 74,50 terealisasi 78,44 (tercapai 105,29%) berdasarkan hasil LHE SAKIP Nomor X.700/524/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Hasil capaian nilai SAKIP tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan Tahun 2024

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI LKE	EVALUASI LAPANGAN	NILAI AKHIR	% CAPAIAN (BOBOT)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,60	16,83	24,65	82,17%
2	Pengukuran Kinerja	30%	27,50	10,00	24,00	80,00%
3	Pelaporan Kinerja	15%	8,18	11,09	8,76	58,40%
4	Evaluasi Kinerja	25%	21,03	-	21,03	84,12%
TOTAL		100%			78,44	

Berdasarkan pada tabel diatas, Kecamatan Plandaan pada tahun 2025 akan melakukan strategi perbaikan AKIP sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen Berita Acara Monitoring Jangka Menengah dan Tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah.
2. Melaksanakan rapat internal di kantor Kecamatan Plandaan untuk meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
3. Menyusun dokumen pengukuran kinerja dan laporan umpan balik atas capaian kinerja individu sehingga hasil umpan balik tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian anggaran, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja
4. Melaksanakan rapat internal untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya dengan tetap memperhatikan kinerja organisasi diatasnya.
5. Melakukan perbaikan Laporan Kinerja dengan seluruhnya menginfokan penyempurnaan kinerja kedepan serta aktivitas dalam strategi perbaikan kinerja kedepan agar seluruhnya menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.
6. Melakukan Melaksanakan Rapat Internal untuk internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan dan pengembangan inovasi.
7. Menyusun dokumen laporan kinerja yang menjabarkan upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya.
8. Melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja tahun 2025
9. Meningkatkan komitmen pimpinan dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder Kecamatan serta optimalisasi ASN dalam melaksanakan akuntabilitas di Kecamatan untuk mencapai target yang ditetapkan.
10. Mengikuti Bimtek yang dilaksanakan Pemkab. Jombang terkait SAKIP
11. Melakukan koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten untuk pendampingan penyusunan dokumen SAKIP dan pengimplementasiannya di Kecamatan

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan target tahun 2024 adalah 8,11 realisasi 8,56 (tercapai 105,55%) berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Nilai IKPP merupakan gabungan dari nilai IKM dan IPP.

- Nilai IKM tahun 2024 adalah 98,30 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/398/415.10.1.3/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- Nilai IPP tahun 2024 adalah 3,65 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/400/415.10.1.3/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Hasil capaian nilai IKM dan IPP tersebut kami uraikan sebagai berikut :

1. IKM Kecamatan Plandaan

IKM Kecamatan Plandaan target tahun 2024 adalah 98,21 terealisasi 98,30 (tercapai 100,09%). Nilai IKM Kecamatan Plandaan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2024 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana (mengajukan tambahan anggaran untuk pelebaran ruang paten dengan pembangunan gedung baru sesuai masterplan Kecamatan Plandaan, namun untuk P-APBD 2025 direncanakan untuk pengurukan dan pembangunan pagar belakang yang akan dibangun gedung kantor Kecamatan baru) serta peningkatan kompetensi petugas berdasarkan PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Berikut kami sajikan data pendukung IKM Kecamatan Plandaan per jenis layanan :

Tabel 3.4**Komponen Hasil Penilaian IKM Kecamatan Plandaan Tahun 2024**

NO	KOMPONEN UNSUR LAYANAN	IKM 2024
1	Layanan KTP	97,52
2	Layanan KK	97,98
3	Layanan SKCK	98,08
4	Layanan mutasi/pindah penduduk antar Kabupaten/Kota	100,00
5	Layanan mutasi/pindah penduduk antar kecamatan	95,00
6	Layanan mutasi/pindah penduduk antar desa	100,00
7	Layanan rekomendasi penerbitan Kartu Jombang Sehat	99,17
8	Layanan rekomendasi proposal bantuan sosial/keagamaan	100,00
9	Layanan dispensasi nikah	97,22
10	Layanan rekomendasi izin keramaian	98,06
TOTAL NILAI		98,30

Berdasarkan pada tabel diatas, Kecamatan Plandaan pada tahun 2025 akan melakukan strategi perbaikan nilai IKM sebagai berikut :

a. Kompetensi petugas

1. Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
2. Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
4. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pelatihan service excellent (pelayanan prima)
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna terhadap petugas dalam memberikan pelayanan
6. Mempermudah pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja untuk menerima dan memproses keluhan, serta menyediakan media yang mudah diakses (Instagram, facebook, website span lapor dan kotak pengaduan)

7. Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun
8. Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon
9. Melaksanakan SKM untuk mengetahui kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan
10. Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan
11. Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kecamatan.

b. Sarana dan Prasarana

Mengajukan tambahan anggaran untuk pelebaran ruang paten dengan pembangunan gedung baru sesuai masterplan Kecamatan Plandaan, namun untuk PAK 2025 direncanakan untuk pengurukan dan pembangunan pagar belakang yang akan dibangun gedung kantor Kecamatan baru.

2. IPP Kecamatan Plandaan

IPP Kecamatan Plandaan target tahun 2024 adalah 3,20 terealisasi 3,65 (capaian 114,06%).

Berikut kami sajikan data pendukung IPP Kecamatan Plandaan per jenis layanan :

Tabel 3.5
Data Pendukung IPP Kecamatan Plandaan Tahun 2024

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	BOBOT	JUMLAH NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK
INDEX F02				3,20
1.	Aspek Kebijakan Pelayanan	30%	3,12	0,75
2.	Aspek Profesional SDM	18%	2,80	0,70
3.	Aspek Sarana dan Prasarana	15%	3,09	0,56
4.	Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	15%	3,20	0,35
5.	Konsultasi dan Pengaduan	15%	4,80	0,48
6.	Inovasi	7%	3,00	0,36
INDEX F03				4,99
Indeks Pelayanan Publik				3,65

Meskipun Nilai IPP Kecamatan Plandaan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun demikian untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IPP tahun 2024 akan dilakukan strategi perbaikan yaitu :

a. Aspek Kebijakan Pelayanan:

- Melakukan reviu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik
- Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)

b. Aspek Profesionalisme SDM:

- Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak
- Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan
- Memberikan reward punishment

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- Mengajukan tambahan anggaran untuk pelebaran ruang paten dengan pembangunan gedung baru sesuai masterplan Kecamatan Plandaan, namun untuk P-APBD 2025 direncanakan untuk pengurukan dan pembangunan pagar belakang yang akan dibangun gedung kantor Kecamatan baru

d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

- Melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital

e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

- Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
- Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat

f. Inovasi

- Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon

Untuk mencapai kinerja tersebut harus dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja utama telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, dimana tercapai 105,42% masuk kategori **ISTIMEWA (SANGAT BERHASIL)**. Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plandaan Tahun 2025 berikut disajikan capaian kinerja IKU sampai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	89,50	95,28	106,46%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM				100,92%

Dari data diatas dapat disimpulkan capaian kinerja program tahun 2024 adalah 100,92% (melebihi target yang telah ditetapkan), dengan rincian sbb:

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur target 100% dapat tercapai 100%.
Pencapaian ini berdasarkan hasil perhitungan formulasi capaian kinerja seluruh PNS dibagi jumlah PNS. Seluruh PNS capaian kinerja adalah 100% sehingga rata-rata capaian kinerja aparatur tercapai 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian kinerjanya adalah 106,46%, dari indikator program yaitu nilai Paten Kecamatan, dimana ditargetkan nilai 89,50 dapat tercapai nilai 95,28 (106,46%).

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu :

- Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

Kegiatan PBHN/PHBA yang dilaksanakan ada 1 kegiatan yaitu Kegiatan Peringatan HUT RI dan kegiatan monev sosial budaya yang dilaksanakan adalah monev Bansos yang dilaksanakan setiap tribulan (4 kegiatan) sehingga capaian kinerjanya 100%.

- Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

Rekomendasi Forkopimcam yang telah ditindaklanjuti :

1. Evaluasi penurunan stunting di Kecamatan Plandaan
2. Pelaksanaan lomba tradisional di Kecamatan Plandaan
3. Percepatan Penurunan Stunting dan tercapainya zero kemiskinan ekstrem di Kecamatan Plandaan
4. Persiapan Perayaan Natal dan Tahun Baru

Kecamatan Plandaan telah melaksanakan koordinasi Forkopimcam setiap tribulan pada tahun 2024 dan semua rekomendasinya telah ditindaklanjuti.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

Pada tahun 2024 di Kecamatan Plandaan tidak terdapat kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum (sesuai dengan Laporan Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum Kecamatan Plandaan yang dilaporkan ke Satpol PP setiap bulan) sehingga indikator persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait tercapai 100%.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase Laporan

Realisasi APBDes tepat waktu dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2024 disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun 2025.

Setiap desa di Kecamatan Plandaan telah melaporkan realisasi APBDesa tepat waktu berupa LRA akhir tahun beserta perdesnya tepat waktu yaitu dilakukan maksimal Bulan Januari 2025 dengan data sbb:

Tabel 3.7
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran (LRA) APBDes
di Kecamatan Plandaan Tahun 2024

NO	DESA	LRA APBDes	
		NO PERDES	TANGGAL
1	KLITIH	1 Tahun 2025	22 Jan 2025
2	PLABUHAN	8 Tahun 2024	31 Des 2024
3	KAMPUNGBARU	2 Tahun 2025	6 Jan 2025
4	GEBANGBUNDER	1 Tahun 2025	2 Jan 2025
5	JATIMLEREK	6 Tahun 2025	2 Jan 2025
6	KARANGMOJO	5 Tahun 2024	31 Des 2024
7	PLANDAAN	8 Tahun 2024	31 Des 2024
8	BANGSRI	1 Tahun 2025	2 Jan 2025
9	PURISEMANDING	1 Tahun 2025	2 Jan 2025
10	TONDOWULAN	1 Tahun 2025	3 Jan 2025
11	DARUREJO	1 Tahun 2025	2 Jan 2025
12	SUMBERJO	5 Tahun 2024	31 Des 2024
13	JIPORAPAH	1 Tahun 2025	6 Jan 2025

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

- Setiap Desa di Kecamatan Plandaan telah menyusun APBDes dan Perubahan APBDes tepat waktu sebanyak 26 dokumen. P-APBDes tahun 2024 ditetapkan maksimal 31 Oktober 2024 dan APBDes 2025 ditetapkan maksimal 31 Desember 2024.

Tabel 3.8
Data P-APBDes 2024 dan APBDes 2025
di Kecamatan Plandaan Tahun 2024

NO	DESA	P-APBDes 2024		APBDes 2025	
		NO PERDES	TANGGAL	NO PERDES	TANGGAL
1	KLITIH	5 Tahun 2024	30 Okt 2024	6 Tahun 2024	31 Des 2024
2	PLABUHAN	4 Tahun 2024	23 Sep 24	7 Tahun 2024	31 Des 2024
3	KAMPUNGBARU	9 Tahun 2024	7 Okt 2024	8 Tahun 2024	31 Des 2024
4	GEBANGBUNDER	5 Tahun 2024	4 Okt 2024	6 Tahun 2024	31 Des 2024
5	JATIMLEREK	2 Tahun 2024	30 Sep 24	7 Tahun 2024	31 Des 2024
6	KARANGMOJO	4 Tahun 2024	31 Okt 2024	6 Tahun 2024	31 Des 2024
7	PLANDAAN	4 Tahun 2024	07 Oct 24	7 Tahun 2024	31 Des 2024
8	BANGSRI	4 Tahun 2024	26 Sep 24	5 Tahun 2024	30 Des 2024
9	PURISEMANDING	4 Tahun 2024	30 Sep 24	6 Tahun 2024	31 Des 2024
10	TONDOWULAN	5 Tahun 2024	11 Okt 2024	5 Tahun 2024	31 Des 2024
11	DARUREJO	9 Tahun 2024	01-Okt-24	5 Tahun 2024	31 Des 2024
12	SUMBERJO	4 Tahun 2024	1 Okt 2024	6 Tahun 2024	31 Des 2024
13	JIPURAPAH	3 Tahun 2024	2 Okt 2024	4 Tahun 2024	31 Des 2024

- Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Plandaan ada 26 lembaga yaitu PKK dan BUMDes dari masing-masing desa (2 lembaga x 13 desa = 26 lembaga) dan semuanya aktif (capaian 100%).

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran – Sub Kegiatan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	78,44	105,29%
Program penunjang	Persentase rata-rata	100%	100%	100%

Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	capaian kinerja aparatur			
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan</i>	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100%
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	100%	100%	100%
	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10 orang/bulan	10 orang/bulan	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan</i>	100%	100%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 paket	14 paket	100%
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100%	100%	100%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 paket	36 paket	100%

Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	8 laporan	100%
<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	100%	100%	100%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	46 unit	46 unit	100%
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	100%	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100%
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	85%	85%	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	10 unit	100%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	10 unit	100%

Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	8,56	105,55%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	89,50	95,28	106,46%
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan</i>	5 laporan	5 laporan	100%
	<i>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam</i>	4 dokumen	4 dokumen	100%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%
Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100%	100%

<i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait</i>	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap</i>	13 desa	13 desa	100%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	26 lembaga	26 lembaga	100%
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa	13 desa	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	78 lembaga kemasyarakatan	100%

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

**Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja**

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Plandaan	n/a	70,17	74,09	n/a
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	n/a	100%	100%	n/a
Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Plandaan	n/a	94,22	97,78	n/a
	IPP Kecamatan Plandaan	n/a	3,49	2,95	n/a
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	n/a	86,31	87,94	n/a
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	n/a	100%	100%	n/a

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	n/a	100%	100%	n/a
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	n/a	100%	100%	n/a
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	n/a	100%	100%	n/a
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	n/a	100%	100%	n/a
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	n/a	100%	100%	n/a
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	n/a	100%	100%	n/a
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	n/a	100%	100%	n/a
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	n/a	100%	100%	n/a
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	n/a	26 lembaga	26 lembaga	n/a

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	n/a	n/a	78,44
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	n/a	n/a	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	n/a	n/a	8,56
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	89,50	n/a	n/a	95,28
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	n/a	n/a	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	n/a	n/a	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	n/a	n/a	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	n/a	n/a	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	n/a	n/a	100%

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Plandaan	n/a	70,17	74,09	n/a
Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Plandaan	n/a	94,22	97,78	n/a
	IPP Kecamatan Plandaan	n/a	3,49	2,95	n/a
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	n/a	100%	100%	n/a
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	n/a	100%	100%	n/a
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	n/a	100%	100%	n/a
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	n/a	n/a	78,44
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	n/a	n/a	8,56 (IKM 98,30 dan IPP 3,65)

Dari tabel diatas rata-rata capaian kinerja sasaran mulai tahun 2022, 2023, dan 2024 mengalami kenaikan, namun ada 1 (satu) indikator sasaran yang mengalami penurunan yaitu IPP di tahun 2023

Berikut kami sajikan perbandingan realisasi kinerja (sasaran) tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan tahun 2024 selalu meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Nilai evaluasi AKIP tahun 2022 adalah 70,17

Nilai evaluasi AKIP tahun 2023 adalah 74,09

Nilai evaluasi AKIP tahun 2024 adalah 78,44

Pada tahun 2024 meningkat 5,87% dibandingkan tahun 2023

Pada tahun 2023 meningkat 5,59% dibandingkan tahun 2022

Peningkatan nilai AKIP ini tidak terlepas dari upaya untuk memperbaiki kinerja dari tahun sebelumnya dengan melakukan evaluasi dan monitoring pencapaian target secara berkala serta menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian AKIP dari instansi terkait.

Sasaran II : Meningkatnya kualitas layanan publik

Indikator sasaran : Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan.

IKPP merupakan gabungan dari IKM dan IPP.

1. IKM Kecamatan Plandaan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai IKM Kecamatan Plandaan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Nilai IKM tahun 2022 adalah 94,22

Nilai IKM tahun 2023 adalah 97,78

Nilai IKM tahun 2024 adalah 98,30

Pada tahun 2024 meningkat 0,53% dibandingkan tahun 2023

Pada tahun 2023 meningkat 3,78% dibandingkan tahun 2022

2. IPP Kecamatan Plandaan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa IPP Kecamatan Plandaan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Nilai IPP tahun 2022 adalah 3,49

Nilai IPP tahun 2023 adalah 2,95

Nilai IPP tahun 2024 adalah 3,65

Pada tahun 2024 meningkat 23,73% dibandingkan tahun 2023

Pada tahun 2023 turun 15,47% dibandingkan tahun 2022

Sehingga Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023

Nilai IKPP tahun 2022 (hasil konversi nilai IKM dan IPP) adalah 8,20

Nilai IKPP tahun 2023 (hasil konversi nilai IKM dan IPP) adalah 7,84

Nilai IKPP tahun 2024 adalah 8,56

Pada tahun 2024 meningkat 9,18% dibandingkan tahun 2023

Pada tahun 2023 turun 4,39% dibandingkan tahun 2022

Peningkatan nilai IKPP ini tidak terlepas dari upaya untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian IKM dan IPP dari instansi terkait.

Untuk Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan dengan indikator : IKM Kecamatan Plandaan, IPP Kecamatan Plandaan, Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait, Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu, dan Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu hanya ada di tahun 2022 dan 2023, sedangkan tahun 2024 mengacu pada RPD tahun 2024-2026. Berdasarkan indikator tersebut hanya indikator IPP yang mengalami penurunan di tahun 2023 (Nilai IPP Kecamatan Plandaan belum berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 karena pada saat penilaian IPP sarana dan prasarana pendukung PATEN sebenarnya sudah dianggarkan pada P-APBD 2023 (pos jaga, tempat parkir pelayanan, playground, kursi tunggu pelayanan dan papan nama PATEN) namun belum dapat direalisasikan karena angkas P-APBD 2023 dianggarkan di Bulan Oktober 2023, sementara penilaian IPP dilakukan pada 30 September 2023), namun demikian Nilai IPP Kecamatan Plandaan dapat meningkat kembali di tahun 2024.

Secara garis besar capaian IKU Kecamatan tahun 2024 dibandingkan dengan 2 tahun terakhir seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian IKU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	71,00	70,17	98,83%	72,00	74,09	102,90%	n/a	n/a	n/a
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Plandaan	93,80	94,22	100,45%	94,30	97,78	103,69%	n/a	n/a	n/a
		IPP Kecamatan Plandaan	3,30	3,49	105,76%	3,50	2,95	84,29%	n/a	n/a	n/a
		Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
		Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
RATA-RATA					100,84%		98,48%				
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	74,50	78,44	105,29%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,11	8,56	105,55%
RATA-RATA											105,42%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian IKU Kecamatan Plandaan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Capaian IKU Kecamatan:

1. Capaian IKU tahun 2022 = 100,84%
2. Capaian IKU tahun 2023 = 98,48%
3. Capaian IKU tahun 2024 = 105,42%

Pada tahun 2024 meningkat 7,05% dibandingkan tahun 2023

Pada tahun 2023 turun 2,36% dibandingkan tahun 2022

Peningkatan capaian IKU ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan kerjasama yang baik dengan semua stakeholder kecamatan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja (Program)

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Program

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
TAHUN 2022 DAN 2023					
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	n/a	100%	100%	n/a
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	n/a	86,31	87,94	n/a
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	n/a	100%	100%	n/a
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	n/a	100%	100%	n/a
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	n/a	100%	100%	n/a
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	n/a	100%	100%	n/a
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan	n/a	100%	100%	n/a

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
	Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	n/a	100%	100%	n/a
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	n/a	26 lembaga	26 lembaga	n/a
TAHUN 2024					
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	n/a	n/a	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	89,50	n/a	n/a	95,28
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	n/a	n/a	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	n/a	n/a	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	n/a	n/a	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	n/a	n/a	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	n/a	n/a	100%

Dari tabel diatas rata-rata capaian kinerja program mulai tahun 2022, 2023, dan 2024 mengalami kenaikan.

Berikut kami sajikan perbandingan realisasi kinerja (program) tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan

semua pegawai telah dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Paten Kecamatan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Nilai PATEN tahun 2022 adalah 86,31

Nilai PATEN tahun 2023 adalah 87,94

Nilai PATEN tahun 2024 adalah 95,28

Pada tahun 2024 meningkat 8,35% dibandingkan tahun 2023

Pada tahun 2023 meningkat 1,89% dibandingkan tahun 2022

Hal ini menunjukkan pelayanan PATEN di Kecamatan Plandaan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan menghadirkan kepuasan masyarakat.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- Indikator Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan tahun 2024. Indikator program tahun 2024 tidak sama dengan tahun 2022 dan 2023.

Indikator Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun 2023 (kegiatan peringatan HUT RI) telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022.

- Indikator Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator program tahun 2024 tidak sama dengan tahun 2022 dan 2023.

- Indikator Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait 2024 tercapai 100%.

Untuk tahun 2022 dan 2023

- Indikator Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022 tercapai 100% (capaian 100%).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator program tahun 2024 tidak sama dengan tahun 2022 dan 2023.

- Indikator Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu tahun 2024 telah tercapai 100% (capaian 100%).

Untuk tahun 2022 dan 2023

- Indikator Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun 2023 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022.
- Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti tahun 2023 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator program tahun 2024 tidak sama dengan tahun 2022 dan 2023.

- Indikator Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif tahun 2024 telah tercapai 100% (capaian 100%).

Untuk tahun 2022 dan 2023

- Indikator Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi tahun 2023 telah tercapai 100% sama dengan capaian 2022.
- Indikator Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun 2023 telah tercapai 26 lembaga sama dengan capaian tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja (Sasaran s/d. Sub Kegiatan)

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja
Sasaran s/d. Sub Kegiatan

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022					
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Plandaan	n/a	70,17	n/a	n/a
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	n/a	100%	n/a	n/a
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	n/a	2 dok	n/a	n/a
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	n/a	5 lap	n/a	n/a
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
	<i>Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Plandaan yang difasilitasi	n/a	14 bln	n/a	n/a
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	n/a	1 dok	n/a	n/a
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	n/a	12 kali	n/a	n/a
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Plandaan</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	n/a	13 stel	n/a	n/a
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	n/a	4 jenis	n/a	n/a
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	n/a	2 jenis	n/a	n/a
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	n/a	1 buku	n/a	n/a
	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	n/a	10.257	n/a	n/a
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	n/a	1 jenis	n/a	n/a
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	n/a	3 kali	n/a	n/a
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	n/a	3 unit	n/a	n/a
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	n/a	12 bulan	n/a	n/a
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	n/a	2 jenis	n/a	n/a
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	<i>n/a</i>	<i>85%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	n/a	1 unit	n/a	n/a
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	n/a	9 unit	n/a	n/a
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Plandaan yang dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	n/a	15 unit	n/a	n/a
Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Plandaan	n/a	94,22	n/a	n/a
	IPP Kecamatan Plandaan	n/a	3,49	n/a	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	n/a	86,31	n/a	n/a
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	n/a	100%	n/a	n/a
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	n/a	100%	n/a	n/a
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	n/a	100%	n/a	n/a
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	n/a	100%	n/a	n/a
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>	<i>n/a</i>	<i>1 lap</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>	<i>n/a</i>	<i>4 dok</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	n/a	1 keg	n/a	n/a
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	n/a	4 lap	n/a	n/a
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	n/a	100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	n/a	100%	n/a	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum</i>	<i>n/a</i>	<i>12 lap</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	n/a	12 keg	n/a	n/a
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	n/a	100%	n/a	n/a
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	n/a	100%	n/a	n/a
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	n/a	100%	n/a	n/a
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>	<i>n/a</i>	<i>26 dok</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	n/a	26 lap	n/a	n/a
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	n/a	100%	n/a	n/a
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	n/a	100%	n/a	n/a
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	n/a	26 lembaga	n/a	n/a
<i>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	<i>Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu</i>	<i>n/a</i>	<i>26 dok</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	<i>n/a</i>	<i>26 lembaga</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	<i>n/a</i>	26 dok	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	<i>n/a</i>	13 Bumdes	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	<i>n/a</i>	13 TP PKK	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023					
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Plandaan	72	n/a	74,09	n/a
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	n/a	100%	n/a
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	<i>n/a</i>	3 dokumen	<i>n/a</i>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	<i>n/a</i>	5 laporan	<i>n/a</i>
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>
	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 orang/bulan	n/a	12 orang/bulan	n/a
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	n/a	1 laporan	n/a
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	n/a	12 dokumen	n/a
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	n/a	n/a	n/a	n/a
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	n/a	100%	n/a
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	n/a	4 paket	n/a
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 paket	n/a	38 paket	n/a
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	1 paket	n/a
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	n/a	2 paket	n/a
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	n/a	1 dokumen	n/a
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	n/a	6 laporan	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	100%	n/a	100%	n/a
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	n/a	20 unit	n/a
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	n/a	2 unit	n/a
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	n/a	1 unit	n/a
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	n/a	100%	n/a
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	n/a	12 laporan	n/a
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	n/a	26 laporan	n/a
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	85%	n/a	85%	n/a
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	9 unit	n/a	9 unit	n/a
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	n/a	9 unit	n/a
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Plandaan	94,30	n/a	97,78	n/a
	IPP Kecamatan Plandaan	3,50	n/a	2,95	n/a
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	86,50	n/a	87,94	n/a
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	n/a	12 laporan	n/a
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	n/a	100%	n/a
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	n/a	100%	n/a
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA</i>	<i>1 laporan</i>	<i>n/a</i>	<i>1 laporan</i>	<i>n/a</i>
	<i>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam</i>	<i>4 dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>4 dokumen</i>	<i>n/a</i>
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	n/a	100 orang	n/a
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	n/a	4 dokumen	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	n/a	100%	n/a
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	n/a	100%	n/a
<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan</i>	<i>12 kegiatan</i>	<i>n/a</i>	<i>12 kegiatan</i>	<i>n/a</i>
<i>Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.</i>	<i>12 laporan</i>	<i>n/a</i>	<i>12 laporan</i>	<i>n/a</i>
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	n/a	100%	n/a
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	n/a	100%	n/a
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	n/a	100%	n/a
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>	<i>26 dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>26 dokumen</i>	<i>n/a</i>
<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>26 dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>26 dokumen</i>	<i>n/a</i>

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	n/a	100%	n/a
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	n/a	100%	n/a
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	n/a	26 lembaga	n/a
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	<i>26 lembaga</i>	<i>n/a</i>	<i>26 lembaga</i>	<i>n/a</i>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	n/a	4 laporan	n/a
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024					
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	n/a	n/a	78,44
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	n/a	n/a	100%
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	n/a	n/a	2 dokumen

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	n/a	n/a	5 laporan
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	100%	n/a	n/a	100%
	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	100%	n/a	n/a	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10 orang/bulan	n/a	n/a	10 orang/bulan
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	n/a	n/a	1 laporan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	n/a	n/a	12 dokumen
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan</i>	100%	n/a	n/a	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 paket	n/a	n/a	14 paket
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100%	n/a	n/a	100%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	n/a	n/a	6 paket
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 paket	n/a	n/a	36 paket

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	n/a	1 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	n/a	n/a	2 paket
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	n/a	n/a	1 dokumen
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	n/a	n/a	8 laporan
<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	100%	n/a	n/a	100%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	46 unit	n/a	n/a	46 unit
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	n/a	n/a	1 unit
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	n/a	n/a	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	n/a	n/a	25 laporan
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	85%	n/a	n/a	85%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	n/a	n/a	10 unit

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	n/a	n/a	10 unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	n/a	n/a	1 unit
Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	n/a	n/a	8,56
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	89,50	n/a	n/a	95,28
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	n/a	n/a	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	n/a	n/a	100%
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan</i>	<i>5 laporan</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>5 laporan</i>
	<i>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam</i>	<i>4 dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>4 dokumen</i>
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	n/a	n/a	150 orang
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	n/a	n/a	4 dokumen

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	n/a	n/a	100%
<i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	n/a	n/a	100%
<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap</i>	<i>13 desa</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>13 desa</i>
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	n/a	n/a	26 dokumen
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	n/a	n/a	100%
<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	<i>26 lembaga</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>26 lembaga</i>
	<i>Jumlah Desa yang menyusun RKPDDes</i>	<i>13 desa</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>13 desa</i>

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	n/a	n/a	4 laporan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	n/a	n/a	78 lembaga kemasyarakatan

Tabel diatas disajikan dalam 3 (tiga) tingkat, dimana pada tingkatan pertama menyajikan data sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022. Sedangkan tingkatan kedua menyajikan data sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan tingkatan ketiga menyajikan data sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sesuai Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

2.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	72,30	78,44	108,49%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,31	8,56	103%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	85,50	95,28	111,44%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
RATA - RATA CAPAIAN				102,55%

Tahun 2024 merupakan tahun pertama periode Renstra 2024-2026 dengan 2 sasaran strategis kecamatan dan 2 indikator kinerja utama. Dari semua indikator sasaran s/d. program Kecamatan Plandaan semuanya telah berhasil mencapai target akhir jangka menengah (Renstra). Penjelasan capaian target jangka menengah (Renstra) kami jabarkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan

Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan, realisasi tahun 2024 adalah 78,44 dari target akhir Renstra sebesar 72,30. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Plandaan telah mencapai tingkat kemajuan 108,49% yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Plandaan telah tercapai melebihi target pada tahun 2024.

Pencapaian ini mencerminkan bahwa akuntabilitas kinerja di Kecamatan Plandaan telah dilaksanakan dengan efektif mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta melaksanakan tindaklanjut hasil rekomendasi dari instansi terkait untuk perbaikan tahun berikutnya.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan (IKPP) Kecamatan Plandaan, realisasi tahun 2024 adalah 8,56 dari target akhir Renstra sebesar 8,31. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Plandaan telah mencapai tingkat kemajuan 103% yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Plandaan telah tercapai melebihi target pada tahun 2024.

Pencapaian ini mencerminkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Plandaan telah dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan dan adanya peningkatan tingkat kepuasan masyarakat. Keberhasilan ini merupakan capaian dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi yang telah dilakukan.

2. Capaian Program terhadap Target Jangka Menengah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Plandaan telah tercapai 100%.

Pencapaian ini mencerminkan bahwa kinerja aparatur telah berjalan dengan efektif dan efisien baik dari kedisiplinan, penyelesaian pekerjaan, dan capaian kinerja.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Indikator Nilai PATEN Kecamatan, realisasi tahun 2024 adalah 95,28 dari target akhir Renstra sebesar 85,50. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Plandaan telah mencapai tingkat kemajuan 111,44% yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Plandaan telah tercapai melebihi target.

Pencapaian ini mencerminkan bahwa pelayanan Paten di Kecamatan Plandaan telah dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan dan adanya peningkatan tingkat kepuasan masyarakat.

Keberhasilan ini merupakan capaian dari aspek teknis, sarana dan prasarana dan administratif.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Indikator Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Plandaan telah tercapai 100%.

Pencapaian ini mencerminkan bahwa seluruh kegiatan PHBN dan PHBA serta kegiatan monev bansos telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

- Indikator Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir

periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Plandaan telah tercapai 100%.

Pencapaian ini mencerminkan rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam telah ditindaklanjuti seluruhnya secara optimal dan tepat waktu.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Indikator Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Plandaan telah tercapai 100%.

Pencapaian ini mencerminkan seluruh laporan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Plandaan telah berhasil dikoordinasikan dengan instansi terkait secara optimal.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Indikator Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Plandaan telah tercapai 100%.

Pencapaian ini mencerminkan bahwa Kecamatan Plandaan telah berhasil melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sehingga semua desa dapat menyampaikan laporan realisasi APBDesa tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.

f. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Indikator Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Plandaan telah tercapai 100%.

Pencapaian ini mencerminkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa mulai dari musrenbangdes, musrenbangcam, musdes RKPDes, dan musdes APBDes telah dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu. Selain itu lembaga kemasyarakatan (PKK dan Bumdes) juga berjalan aktif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada tahun 2024 indikator sasaran strategis telah berhasil mencapai

- target akhir renstra dengan rata – rata tingkat kemajuan 105,75%.
2. Pada tahun 2024 indikator program telah berhasil mencapai target akhir renstra dengan rata – rata tingkat kemajuan 101,63%.
 3. Pada tahun 2024 indikator sasaran s/d. program telah berhasil mencapai target akhir renstra dengan rata – rata tingkat kemajuan 102,55%.

2.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi/kabupaten menyajikan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu nilai AKIP, IKM dan IPP.

- a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja (AKIP, IPP dan IKM)
Kecamatan Plandaan dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2024	Realisasi Nasional	% Perbandingan dengan Nasional	Selisih Realisasi kinerja	Ket
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	78,44	64,23	122,13	14,21	Indikator nasional adalah nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional pemkab/ pemkot
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,56	8,20	104,39	0,36	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) merupakan gabungan nilai IKM dan IPP. IKM nasional tahun 2023 adalah 3,53 dan IPP nasional tahun 2023 adalah 3,78
Sumber: LAKIP Kementerian PAN RB Tahun 2023							

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2024	Realisasi Nasional	% Perbandingan dengan Nasional	Selisih Realisasi kinerja	Ket
3	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional, Provinsi dan Kabupaten
4	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	95,28	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional, Provinsi dan Kabupaten
5	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional, Provinsi dan Kabupaten
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional, Provinsi dan Kabupaten
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional, Provinsi dan Kabupaten
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional, Provinsi dan Kabupaten
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Plandaan tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun 2024 Standar Nasional. Nilai SAKIP Kecamatan 78,44 (BB) sedangkan nilai SAKIP Nasional tahun 2024 rata-rata 64,23 ada selisih lebih sekitar 14,21 Poin. Untuk capaian nilai IKPP Kecamatan Plandaan adalah 8,56 sedangkan nilai IKPP rata-rata nasional sebesar 8,20 ada selisih lebih sebesar 0,36 poin (karena standar nasional tahun 2024 nilainya belum keluar sehingga masih menggunakan hasil standar nasional tahun 2023).

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja di level provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16

Perbandingan realisasi kinerja dengan Provinsi Jawa Timur

Uraian	Realisasi Kecamatan Plandaan	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Selisih Realisasi kinerja
Nilai SAKIP	78,44	84,19	-5,75
IKPP	8,56	9,11	-0,55

Sumber: LAKIP Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur tahun 2024 lebih baik daripada Kecamatan Plandaan. Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Plandaan dibawah nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur dengan selisih -5,75 poin. Realisasi nilai IKPP Kecamatan Plandaan dibawah nilai IKPP Provinsi Jawa Timur dengan selisih 0,55 poin.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja di level Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17

Perbandingan realisasi kinerja dengan Pemerintah Kabupaten Jombang

Uraian	Realisasi Kecamatan Plandaan	Realisasi Kabupaten Jombang	Selisih Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP	78,44	72,33	6,11
IKPP	8,56	8,45	0,11

Sumber: LAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Plandaan tahun 2024 lebih baik dibandingkan rata-rata realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang. Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Plandaan lebih baik dari nilai SAKIP Kabupaten Jombang dengan selisih 6,11 poin. Realisasi nilai IKPP Kecamatan Plandaan lebih baik dari nilai IKPP Kabupaten Jombang dengan selisih 0,11 poin.

2.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja

Secara umum berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang tercermin dari tercapainya target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja. Dari 2 (dua) indikator kinerja utama kecamatan semuanya telah tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan rata – rata capaian sebesar 105,42% dengan kategori ISTIMEWA (SANGAT BERHASIL).

Secara rinci perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran atas sasaran kecamatan tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.18

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN ATAS SASARAN KECAMATAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	78,44	105,29%	2.474.771.465,00	2.216.099.603,00	89,55%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	8,56	105,55%	131.875.400,00	131.225.000,00	99,51%
RATA-RATA					105,42%	2.606.646.865,00	2.347.324.603,00	90,05%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran atas sasaran kecamatan Plandaan tahun 2024 adalah sbb :

1. Sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan capaian kinerjanya 105,29% dengan realisasi anggaran 89,55%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan efisiensi anggaran tetap dapat mencapai kinerja dengan capaian diatas 100%.

2. Sasaran meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan capaian kinerjanya 105,55% dengan realisasi anggaran 99,51%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan efisiensi anggaran tetap dapat mencapai kinerja dengan capaian diatas 100%.

Berikut ini kami sajikan Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

A. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya Kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
2. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
3. Pelayanan non perijinan yaitu cetak KK dan KTP el sudah bisa dilayani di Kantor Kecamatan Plandaan. Hal ini sangat membantu menunjang pelayanan kepada masyarakat karena selama ini cetak KK dan KTP el hanya bisa dilakukan di Dispendukcapil.

4. Dukungan dan komitmen Camat Plandaan, Kepala UPTD se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder kecamatan dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Plandaan untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

B. Faktor penghambat / permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja :

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Plandaan sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Plandaan.
2. Tingkat Kinerja Pelayanan PD masih kurang
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja dan pendukung pelayanan PATEN seperti perluasan ruang PATEN (Pembangunan Gedung Baru Kecamatan) sesuai dengan masterplan Kecamatan Plandaan.
4. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dan RB dalam menjalankan tupoksi.

C. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Permohonan tambahan pegawai Kecamatan Plandaan
- b. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- c. Evaluasi kinerja tahun 2024 untuk dilakukan penguraian masalah dan mencari solusi dan strategi untuk melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi agar kedepannya Kecamatan Plandaan dapat menjadi lebih baik dan selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- d. Mengajukan tambahan anggaran P-APBD 2025 untuk pembangunan pagar dan pengurukan tanah belakang kecamatan yang rencananya akan dibangun gedung baru sesuai dengan masterplan kecamatan.
- e. Diinstruksikan kepada para kasi untuk lebih sering terjun ke desa-desa. Disamping menjaga keharmonisan antara Desa dengan kecamatan, selain itu agar kecukupan data-data bisa segera dipenuhi oleh desa.

- f. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

D. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Plandaan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.19
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output
Yang Dihasilkan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	2.216.099.603,00	89,55%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja nilai SAKIP dan capaian kinerja aparatur. Program ini juga sangat menunjang kegiatan rutin, penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	5.399.900,00	99,97%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100%	4.450.000,00	99,96%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	100%	949.900,00	100,00%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	1.632.264.786,00	86,79%	Sangat Menunjang kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%			Sangat Menunjang kegiatan penyusunan dokumen laporan keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10 orang/bulan	100%	1.567.482.286,00	86,32%	Sangat Menunjang kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	100%	350.000,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan penyusunan dokumen laporan keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100%	64.432.500,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan penatausahaan keuangan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	100%	100%	7.180.000,00	99,72%	Sangat Menunjang kegiatan administrasi kepegawaian
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 paket	100%	7.180.000,00	99,72%	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan pakaian olahraga dan seragam Paten
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	84.667.912,00	97,56%	Sangat Menunjang kegiatan rutin
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	100%	3.248.650,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan komponen instalasi listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 paket	100%	15.246.400,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan ATK dan alat kebersihan/bahan pembersih
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100%	32.053.000,00	94,55%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan makanan dan minuman pegawai
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100%	3.500.000,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan rutin fotocopy dan cetak amplop dinas
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100%	2.275.000,00	96,73%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan surat kabar Jawa Pos
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	100%	28.344.862,00	99,32%	Sangat Menunjang kegiatan perjalanan dinas ASN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	279.296.100,00	99,20%	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan gedung dan sarana prasarana

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	46 unit	100%	180.339.600,00	99,19%	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan sarana prasarana gedung kantor
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100%	98.956.500,00	99,22%	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan bangunan gedung kantor untuk penyusunan masterplan kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	137.655.605,00	98,11%	Sangat Menunjang kegiatan pembayaran tagihan listrik, honor non ASN, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan serta pembayaran PBB
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100%	28.969.820,00	96,57%	Sangat Menunjang kegiatan rutin pembayaran tagihan listrik
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	100%	108.685.785,00	98,53%	Sangat Menunjang kegiatan pembayaran honor non ASN, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dan pembayaran PBB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	100%	69.635.300,00	95,67%	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	100%	48.485.300,00	94,08%	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	100%	8.060.000,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100%	13.090.000,00	99,21%	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan gedung kantor (pengecatan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	95,28	106,46%	4.550.000,00	92,80%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penilaian IKPP (IKM dan IPP) serta PATEN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	4.550.000,00	92,80%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penilaian IKM, IPP dan PATEN
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	100%	4.550.000,00	92,80%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penilaian IKM, IPP dan PATEN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Kecamatan	wilayah Kecamatan					
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	76.915.000,00	99,66%	Sangat Menunjang kegiatan PHBN Peringatan HUT RI dan Monev Bansos Tribunalan
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%			Sangat Menunjang kegiatan koordinasi Forkopimcam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	100%	76.915.000,00	99,66%	Sangat Menunjang kegiatan PHBN Peringatan HUT RI dan Monev Bansos Tribunalan
	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	100%			Sangat Menunjang kegiatan koordinasi Forkopimcam
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	100%	30.990.000,00	99,16%	Sangat Menunjang kegiatan PHBN Peringatan HUT RI dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100%	45.925.000,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan koordinasi Forkopimcam
Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100%	11.050.000,00	99,94%	Sangat Menunjang kegiatan keamanan dan ketertiban termasuk kegiatan antisipasi pelanggaran Perda/Perkada
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	11.050.000,00	99,94%	Sangat Menunjang kegiatan keamanan dan ketertiban termasuk kegiatan antisipasi pelanggaran Perda/Perkada
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	100%	11.050.000,00	99,94%	Sangat Menunjang kegiatan keamanan dan ketertiban termasuk kegiatan antisipasi pelanggaran Perda/Perkada
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	5.465.000,00	99,76%	Sangat Menunjang kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pertanggungjawaban realisasi APBDesa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	13 desa	100%	5.465.000,00	99,76%	Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	100%	5.465.000,00	99,76%	Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa, pertanggungjawaban realisasi APBDesa serta pendayagunaan aset desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	33.245.000,00	99,96%	Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan desa serta pemberdayaan masyarakat desa
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	100%	33.245.000,00	99,96%	Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan desa serta kegiatan PKK dan BUMDesa
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa	100%			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100%	16.525.000,00	99,98%	Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PKK dan BUMDesa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	100%	16.720.000,00	99,94%	Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan desa
REALISASI				2.347.324.603,00	90,05%	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan :

a. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

b. Program/Kegiatan yang mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja:

Tidak terdapat program/kegiatan yang mengakibatkan kegagalan pencapaian kinerja karena semua program/kegiatan sangat menunjang pencapaian kinerja.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Plandaan Tahun 2024, bahwa untuk mendukung tujuan organisasi ditetapkan 2 sasaran strategis Kecamatan dan untuk mencapai sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2024 ini Kecamatan Plandaan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.606.646.865 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.347.324.603 atau serapan dana APBD mencapai 90,05% sehingga dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran Silpa Rp.259.322.262 Dimana sisa anggaran paling banyak terdapat pada sub kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.248.473.179 Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.20
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	2.474.771.465,00	94,94%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	131.875.400,00	5,06%
TOTAL			2.606.646.865,00	100%

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

- a. Secara rinci realisasi kinerja dan realisasi anggaran sasaran s/d. program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	78,44	105,29%	2.474.771.465,00	2.216.099.603,00	89,55%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2.474.771.465,00	2.216.099.603,00	89,55%
Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	8,56	105,55%	131.875.400,00	131.225.000,00	99,51%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	89,50	95,28	106,46%	4.903.200,00	4.550.000,00	92,80%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	77.179.600,00	76.915.000,00	99,66%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100%	100%	11.056.400,00	11.050.000,00	99,94%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	5.478.200,00	5.465.000,00	99,76%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	33.258.000,00	33.245.000,00	99,96%

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (SASARAN)	105,42%	2.606.646.865,00	2.347.324.603,00	90,05%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM)	100,92%			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (SASARAN & PROGRAM)	101,92%			

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan PD yaitu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 90,05% telah menghasilkan kinerja sebesar 105,42% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 15,37%. Untuk capaian program dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 90,05% telah menghasilkan kinerja sebesar 100,92% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 10,87%. Untuk capaian kinerja secara keseluruhan (sasaran s/d. program) dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 90,05% telah menghasilkan kinerja sebesar 101,92% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 11,87%

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Plandaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.22

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Plandaan Tahun 2024

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	78,44	105,29%	2.474.771.465,00	2.216.099.603,00	89,55%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2.474.771.465,00	2.216.099.603,00	89,55%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	5.401.500,00	5.399.900,00	99,97%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	4.451.600,00	4.450.000,00	99,96%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5 laporan	5 laporan	100%	949.900,00	949.900,00	100,00%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
	Kinerja SKPD						
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%	1.880.737.965,00	1.632.264.786,00	86,79%
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10 orang/bulan	10 orang/bulan	100%	1.815.955.465,00	1.567.482.286,00	86,32%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	350.000,00	350.000,00	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	64.432.500,00	64.432.500,00	100,00%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	100%	100%	100%	7.200.000,00	7.180.000,00	99,72%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 paket	14 paket	100%	7.200.000,00	7.180.000,00	99,72%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	86.786.050,00	84.667.912,00	97,56%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%	3.248.650,00	3.248.650,00	100,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 paket	36 paket	100%	15.246.400,00	15.246.400,00	100,00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	33.900.000,00	32.053.000,00	94,55%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%	2.352.000,00	2.275.000,00	96,73%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	8 laporan	100%	28.539.000,00	28.344.862,00	99,32%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	281.546.818,00	279.296.100,00	99,20%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	46 unit	46 unit	100%	181.809.100,00	180.339.600,00	99,19%
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%	99.737.718,00	98.956.500,00	99,22%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	140.311.100,00	137.655.605,00	98,11%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	30.000.000,00	28.969.820,00	96,57%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100%	110.311.100,00	108.685.785,00	98,53%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	85%	100%	72.788.032,00	69.635.300,00	95,67%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	10 unit	100%	51.534.082,00	48.485.300,00	94,08%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10 unit	100%	8.060.000,00	8.060.000,00	100,00%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	13.193.950,00	13.090.000,00	99,21%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	89,50	95,28	106,46%	4.903.200,00	4.550.000,00	92,80%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%	4.903.200,00	4.550.000,00	92,80%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%	4.903.200,00	4.550.000,00	92,80%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	77.179.600,00	76.915.000,00	99,66%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	100%	77.179.600,00	76.915.000,00	99,66%
	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%			
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100%	31.253.000,00	30.990.000,00	99,16%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%	45.926.600,00	45.925.000,00	100,00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	100%	100%	11.056.400,00	11.050.000,00	99,94%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	100%	11.056.400,00	11.050.000,00	99,94%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100%	11.056.400,00	11.050.000,00	99,94%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	5.478.200,00	5.465.000,00	99,76%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	13 desa	13 desa	100%	5.478.200,00	5.465.000,00	99,76%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100%	5.478.200,00	5.465.000,00	99,76%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	33.258.000,00	33.245.000,00	99,96%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100%	33.258.000,00	33.245.000,00	99,96%
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa	13 desa	100%			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%	16.528.200,00	16.525.000,00	99,98%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	78 lembaga kemasyarakatan	100%	16.729.800,00	16.720.000,00	99,94%
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				100,35%	2.606.646.865,00	2.347.324.603,00	90,05%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum meskipun terdapat efisiensi anggaran tidak mempengaruhi capaian kinerja bahkan capaian kinerja dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Plandaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2024-2026 Kecamatan Plandaan yakni Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi didapatkan dari capaian kinerja dikurangi ketersediaan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Plandaan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Plandaan langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. **Transparan**

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Plandaan melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.23

Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	SASARAN: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan	105,29%	89,55%	15,74
	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	89,55%	10,45
2.	SASARAN: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik				
	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan		105,55%	99,51%	6,04
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	106,46%	92,80%	13,66
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	99,66%	0,34

NO	SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%		0,34
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	99,94%	0,06
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	99,76%	0,24
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	99,96%	0,04
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN			101,92%	90,05%	11,87

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 11,87. Hasil tersebut bisa dilihat dari capaian kinerja yang lebih besar dari realisasi anggaran.

Rincian efisiensi penggunaan anggaran dari sasaran sampai dengan sub kegiatan kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.24

Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran s/d. Sub Kegiatan

NO	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	SASARAN: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan	105,29%	89,55%	15,74
	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	89,55%	10,45
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	99,97%	0,03
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100%	99,96%	0,04
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100,00%	0,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	86,79%	13,21

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%		13,21
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	86,32%	13,68
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100,00%	0,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100,00%	0,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	100%	99,72%	0,28
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	99,72%	0,28
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	97,56%	2,44
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100,00%	0,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100,00%	0,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	94,55%	5,45
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100,00%	0,00
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	96,73%	3,27
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,32%	0,68
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	99,20%	0,80
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	99,19%	0,81
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	99,22%	0,78
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	98,11%	1,89

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	96,57%	3,43
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	98,53%	1,47
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	95,67%	4,33
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	100%	94,08%	5,92
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100,00%	0,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	99,21%	10,45
	SASARAN: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik				
	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan		105,55%	99,51%	6,04
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	106,46%	92,80%	11,39
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100,00%	92,80%	9,73
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100,00%	92,80%	9,73
	nggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100,00%	6%	0,78
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100,00%		0,78
	nggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100,00%	6%	0,78
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	100,00%		0,78
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100,00%	99,16%	0,85
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100,00%	100,00%	0,09

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100,00%	99,94%	1,56
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100,00%	99,94%	1,56
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100,00%	99,94%	1,56
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100,00%	99,76%	1,56
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	100,00%	99,76%	0,1
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100,00%	6%	0,1
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100,00%	99,96%	0,1
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	100,00%	99,96%	0,1
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	100,00%		0,1
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	99,98%	0,8
	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	100,00%	99,94%	0,8
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN			100,35%	90,05%	10,30

Selain penggunaan anggaran, sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tingkat efisiensi hasil Capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sumber daya manusia di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Kecamatan Plandaan
Kabupaten Jombang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Sarana dan Prasarana Tahun 2023			EFISIENSI SDM
			Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan SDM (ABK)	Ketersediaan SDM	% Ketersediaan SDM	
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	78,44	105,29%	20	5	25,00%	80,29%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	8,56	105,55%	29	4	13,79%	91,76%
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA RATA-RATA					105,42%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		14,40%	91,02%
TINGKAT EFISIENSI SDM									91,02%

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia pada kisaran 91,02% dimana dari 49 anjab ABK Kecamatan Plandaan ketersediaan SDM adalah 9 dengan persentase ketersediaan 14,40% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai target kinerja sebesar yaitu 105,42%.

Kondisi perbandingan antara kebutuhan standar SDM dan sarana prasarana yang ada pada Kecamatan Plandaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Ketersediaan Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5
1	A.C. Split	6	8	75%
2	Alat Kantor Lainnya	1	1	100%
3	Alat Pemadam/Portable	1	1	100%
4	Bangku Tunggu	1	1	100%
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	100%
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	100%
7	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	100%
8	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	100%
9	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1	100%
10	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1	100%
11	Digital LED Running Text	1	1	100%
12	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	100%
13	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	100%
14	Generator	1	1	100%
15	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100%
16	Kipas Angin	2	2	100%
17	Kursi Dorong	1	1	100%

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5
18	Kursi Lipat	1	1	100%
19	Kursi Rapat	2	8	25%
20	Kursi Tamu	1	1	100%
21	Lap Top	6	7	85,71%
22	Layar Film/Projector	1	1	100%
23	Lemari Kayu	1	1	100%
24	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	100%
25	Meja 1/2 Biro	1	1	100%
26	Meja Operator	1	1	100%
27	Meja Resepsionis	2	2	100%
28	Mesin Absensi	1	1	100%
29	Mesin Antrian	1	1	100%
30	P.C Unit	5	5	100%
31	Papan Visual/Papan Nama	1	1	100%
32	Peralatan Komputer lainnya	1	1	100%
33	Peralatan Permainan lainnya	1	1	100%
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	16	100%
35	Rak Besi	1	1	100%
36	Rak Kayu	3	3	100%
37	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	1	1	100%
38	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2	100%
39	Sepeda Motor	10	11	90,91%
40	Sofa	1	3	33,33%
41	Sound System	1	1	100%
42	Station Wagon	1	1	100%
43	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	3	100%
44	Tanah Lapangan Sepak Bola	1	1	100%
45	Tanah Sawah Irigasi	2	2	100%
46	Tangga Aluminium	2	2	100%
47	Televisi	2	2	100%

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5
48	Filling Cabinet 4 laci	0	1	0%
49	Lemari Arsip 2 Pintu	0	1	0%
50	Meja Rapat	0	3	0%
51	CCTV	0	8	0%
52	Webcam	0	1	0%
53	Kursi Pejabat	0	6	0%
54	Taplak Meja Rapat	0	1	0%
55	sound system	0	1	0%
56	korden	0	9	0%
57	clip on	0	2	0%
58	lemari es	0	1	0%
59	tempat tidur uks	0	1	0%
60	pintu KM/WC	0	2	0%
61	lemari kaca	0	2	0%
62	filling cabinet	0	2	0%
	TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS	95	149	63,76%

Tabel 3.26

Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Sarana dan Prasarana Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Hasil Rekon 2023	Usulan Standar Kebutuhan	% Keterse diaan Sarpras
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	78,44	105,29 %	95	149	63,76%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	8,56	105,55 %			
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA RATA-RATA					105,42%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		63,76%
TINGKAT EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA					41,66%			

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi sarana dan prasarana

pada kisaran 41,66% dengan ketersediaan sarana prasarana penunjang 63,76%.

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Upaya perbaikan kinerja yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan tambahan pegawai Kecamatan Plandaan
2. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
3. Evaluasi kinerja tahun 2024 untuk perbaikan kinerja tahun 2025 dengan melaksanakan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 akan dilakukan strategi perbaikan yaitu :

❖ Perbaikan nilai AKIP:

1. Menyusun dokumen Berita Acara Monitoring Jangka Menengah dan Tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah.
2. Melaksanakan rapat internal di kantor Kecamatan Plandaan untuk meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
3. Menyusun dokumen pengukuran kinerja dan laporan umpan balik atas capaian kinerja individu sehingga hasil umpan balik tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian anggaran, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja
4. Melaksanakan rapat internal untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya dengan tetap memperhatikan kinerja organisasi di atasnya.
5. Melakukan perbaikan Laporan Kinerja dengan seluruhnya menginfokan penyempurnaan kinerja kedepan serta aktivitas dalam strategi perbaikan kinerja kedepan agar seluruhnya menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.

6. Melakukan Melaksanakan Rapat Internal untuk internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan dan pengembangan inovasi.
7. Menyusun dokumen laporan kinerja yang menjabarkan upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya.
8. Melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja tahun 2025
9. Meningkatkan komitmen pimpinan dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder Kecamatan serta optimalisasi ASN dalam melaksanakan akuntabilitas di Kecamatan untuk mencapai target yang ditetapkan.
10. Mengikuti Bimtek yang dilaksanakan Pemkab. Jombang terkait SAKIP
11. Melakukan koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten untuk pendampingan penyusunan dokumen SAKIP dan pengimplementasiannya di Kecamatan

❖ Perbaikan nilai IKM:

a. Kompetensi petugas

1. Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
2. Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
4. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pelatihan service excellent (pelayanan prima)
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna terhadap petugas dalam memberikan pelayanan
6. Mempermudah pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja untuk menerima dan memproses keluhan, serta menyediakan media yang mudah diakses diakses (Instagram, facebook, website span lapor dan kotak pengaduan)
7. Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun.

8. Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon
 9. Melaksanakan SKM untuk mengetahui kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan
 10. Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan
 11. Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kecamatan.
- b. Sarana dan Prasarana
- Mengajukan tambahan anggaran untuk pelebaran ruang paten dengan pembangunan gedung baru sesuai masterplan Kecamatan Plandaan, namun untuk PAK 2025 direncanakan untuk pengurukan dan pembangunan pagar belakang yang akan dibangun gedung kantor Kecamatan baru.
- ❖ Perbaiki nilai IPP:
- a. Aspek Kebijakan Pelayanan:
 - Melakukan reuiu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik
 - Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)
 - b. Aspek Profesionalisme SDM:
 - Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak
 - Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan
 - Memberikan reward punishment
 - c. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Mengajukan tambahan anggaran untuk pelebaran ruang paten dengan pembangunan gedung baru sesuai masterplan Kecamatan Plandaan, namun untuk P-APBD 2025 direncanakan untuk pengurukan dan pembangunan pagar belakang yang akan dibangun gedung kantor Kecamatan baru
 - d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
 - Melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital

e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

- Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
- Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat

f. Inovasi

- Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon

4. Diinstruksikan kepada para kasi untuk lebih sering terjun ke desa-desa. Disamping menjaga keharmonisan antara Desa dengan kecamatan, selain itu agar kecukupan data-data bisa segera dipenuhi oleh desa.
5. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

Tabel 3.27
MATRIK TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres
1	Melakukan tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah	Menyusun dokumen Berita Acara Monitoring Jangka Menengah dan Tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen Berita Acara Monitoring Jangka Menengah ➤ Matrik Tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah 	Sampai 31 Maret 2025	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
2	Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional	Melaksanakan rapat internal di kantor Kecamatan Plandaan untuk meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan Rapat Internal Tribulanan ➤ SK Tim SAKIP ➤ SK dan BA Reviu Renstra ➤ SK Tim Monev Jangka Menengah ➤ Kegiatan Rapat Penetapan Target Tahun 2025 dan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 ➤ Kertas Kerja Penetapan Target 	Sampai 30 Juni 2025	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres
		penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional (Semua pegawai dilibatkan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja) dapat dilihat pada dokumentasi kegiatan	➤ Kegiatan Monitoring Target Jangka Menengah			
3	Memberikan umpan balik atas capaian kinerja individu pada dokumen pengukuran kinerja pegawai sehingga hasil umpan balik tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian anggaran, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja	Menyusun dokumen pengukuran kinerja dan laporan umpan balik atas capaian kinerja individu sehingga hasil umpan balik tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian anggaran, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen Pengukuran Kinerja ➤ Laporan Umpan Balik Capaian Kinerja Individu 	Sampai 30 Juni 2025	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
4	Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting	Melaksanakan rapat internal untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode	Kegiatan Rapat Internal Tribulanan (evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran)	Sampai 30 Juni 2025	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres
	untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya	selanjutnya dengan tetap memperhatikan kinerja organisasi di atasnya				
5	Upaya strategi perbaikan yang dijabarkan agar seluruhnya menginfokan penyempurnaan kinerja kedepan serta aktivitas dalam strategi perbaikan kinerja kedepan agar seluruhnya dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran	Melakukan perbaikan Laporan Kinerja dengan seluruhnya menginfokan penyempurnaan kinerja kedepan serta aktivitas dalam strategi perbaikan kinerja kedepan agar seluruhnya menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen LKJIP 2024 ➤ Dokumen LKI 2024 	Sampai 31 Maret 2025	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
6	Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan Rapat Internal untuk internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan dan pengembangan inovasi ➤ Menyusun dokumen laporan kinerja yang menjabarkan upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan Rapat Internal Tribunalan ➤ Dokumen LKJIP 2024 	Sampai 30 Juni 2025	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres
	gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya					
7	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya	Melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja tahun 2025	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen Berita Acara Monitoring Jangka Menengah ➤ Matrik Tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah ➤ Kegiatan Rapat Internal Tribulanan ➤ SK Tim SAKIP ➤ SK dan BA Reviu Renstra ➤ SK Tim Monev Jangka Menengah ➤ Kegiatan Rapat Penetapan Target Tahun 2025 dan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 ➤ Kertas Kerja Penetapan Target ➤ Kegiatan Monitoring Target Jangka Menengah 	Sampai 30 Juni 2025	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen Pengukuran Kinerja ➤ Laporan Umpan Balik Capaian Kinerja Individu ➤ Dokumen LKJIP 2024 ➤ Dokumen LKI 2024 			

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Plandaan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2024. Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Plandaan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2024, anggaran yang telah direncanakan juga bisa terserap dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2024 yaitu perlu adanya tambahan personil dan peningkatan SDM personil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Kecamatan Plandaan Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Plandaan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan, kinerjanya telah terealisasi 105,42% atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Plandaan Tahun 2024. Dari 2 (dua) indikator IKU, semuanya telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Kecamatan Plandaan tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	78,44	105,29%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	8,56	105,55%
Rata-rata Capaian IKU				105,42%

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan target tahun 2024 adalah 74,50 terealisasi 78,44 (tercapai 105,29%) berdasarkan hasil LHE SAKIP Nomor X.700/524/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Sehingga indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan target tahun 2024 adalah 8,11 realisasi 8,56 (tercapai 105,55%) berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024. Sehingga indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan melebihi target yang ditetapkan.

Nilai IKPP merupakan gabungan dari nilai IKM dan IPP.

- Nilai IKM tahun 2024 adalah 98,30 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/398/415.10.1.3/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- Nilai IPP tahun 2024 adalah 3,65 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/400/415.10.1.3/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui meskipun semua indikator sasaran dan program telah tercapai, namun ke depan tetap perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal.

Upaya perbaikan kinerja yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan tambahan pegawai Kecamatan Plandaan
2. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
3. Evaluasi kinerja tahun 2024 untuk perbaikan kinerja tahun 2025 dengan melaksanakan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 akan dilakukan strategi perbaikan yaitu :

❖ Perbaikan nilai AKIP:

1. Menyusun dokumen Berita Acara Monitoring Jangka Menengah dan Tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah.
2. Melaksanakan rapat internal di kantor Kecamatan Plandaan untuk meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
3. Menyusun dokumen pengukuran kinerja dan laporan umpan balik atas capaian kinerja individu sehingga hasil umpan balik tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian anggaran, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja
4. Melaksanakan rapat internal untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya dengan tetap memperhatikan kinerja organisasi di atasnya.
5. Melakukan perbaikan Laporan Kinerja dengan seluruhnya menginfokan penyempurnaan kinerja kedepan serta aktivitas dalam strategi perbaikan kinerja kedepan agar seluruhnya menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.
6. Melakukan Melaksanakan Rapat Internal untuk internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan dan pengembangan inovasi.
7. Menyusun dokumen laporan kinerja yang menjabarkan upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya.
8. Melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja tahun 2025
9. Meningkatkan komitmen pimpinan dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder Kecamatan serta optimalisasi ASN dalam melaksanakan akuntabilitas di Kecamatan untuk mencapai target yang ditetapkan.
10. Mengikuti Bimtek yang dilaksanakan Pemkab. Jombang terkait SAKIP

11.Melakukan koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten untuk pendampingan penyusunan dokumen SAKIP dan pengimplementasiannya di Kecamatan

❖ Perbaiki nilai IKM:

a. Kompetensi petugas

1. Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
2. Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
4. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pelatihan service excellent (pelayanan prima)
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna terhadap petugas dalam memberikan pelayanan
6. Mempermudah pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja untuk menerima dan memproses keluhan, serta menyediakan media yang mudah diakses (Instagram, facebook, website span lapor dan kotak pengaduan)
7. Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun.
8. Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon
9. Melaksanakan SKM untuk mengetahui kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan
- 10.Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan
- 11.Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kecamatan.

b. Sarana dan Prasarana

Mengajukan tambahan anggaran untuk pelebaran ruang paten dengan pembangunan gedung baru sesuai masterplan Kecamatan Plandaan, namun untuk PAK 2025 direncanakan untuk pengurukan dan

pembangunan pagar belakang yang akan dibangun gedung kantor Kecamatan baru.

❖ Perbaiki nilai IPP:

a. Aspek Kebijakan Pelayanan:

- Melakukan reviu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik
- Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)

d. Aspek Profesionalisme SDM:

- Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak
- Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan
- Memberikan reward punishment

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Mengajukan tambahan anggaran untuk pelebaran ruang paten dengan pembangunan gedung baru sesuai masterplan Kecamatan Plandaan, namun untuk P-APBD 2025 direncanakan untuk pengurukan dan pembangunan pagar belakang yang akan dibangun gedung kantor Kecamatan baru

d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

- Melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital

e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

- Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
- Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat

f. Inovasi

- Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon

4. Diinstruksikan kepada para kasi untuk lebih sering terjun ke desa-desa. Disamping menjaga keharmonisan antara Desa dengan kecamatan, selain itu agar kecukupan data-data bisa segera dipenuhi oleh desa.

5. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Plandaan, 6 Maret 2025

CAMAT PLANDAAN



SUPARNO, SH

Pembina

NIP. 19670510 199302 1 003